

# IMPLEMENTASI KUHAP TERHADAP BARANG SITAAN TINDAK PIDANA YANG TIDAK SEGERA DILAKUKAN LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RUPBASAN

(Studi Kasus : Rupbasan Klas 1 Jakarta Timur)

<sup>1</sup>Heriando Nainggolan, <sup>2</sup>Nugraha Abdul Kadir,  
Universitas Esa Unggul

Terusan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk. Jakarta  
heriando096@gmail.com, nugraha\_ipc@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Permasalahan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Karena dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus bersikap hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan. Pengelolaan benda rampasan negara merupakan konsekuensi dari penyitaan bendadilakukan oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa Benda sitaan Negara disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau disebut Rupbasan. Namun persoalannya Banyak barang sitaan tidak disimpan di Rupbasan melainkan disimpan diberbagai instansi lain atau lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan. Dalam Penelitian ini rumusan masalah yang diambil *pertama*, Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pasal 44 dan Pasal 45 KUHAP dalam melakukan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. *kedua*, Bagaimanakah Jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang eksekusinya dengan pelelangan benda/barang sitaan Negara, dan Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak RUBASAN Klas 1 Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Dimana penelitian ini langsung melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang diinginkan di Rupbasan Klas 1 Jakarta Timur.

Kata Kunci : Implementasi Kuhap Pengelolaan Benda Sitaan, Rupbasan Jakarta Timur, lelang.

## ABSTRACT

Problems with managing confiscated objects and booty. Because in its development, the management of confiscated objects and booty must be careful in managing seized objects and booty. Management of state booty is a consequence of confiscation of goods by investigators. Based on Article 44 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, state confiscated objects are stored in state confiscated goods storage warehouses or known as Rupbasan. However, the problem is that many of the confiscated items were not stored in the Rupbasan but were kept in various agencies or other institutions that have the authority to carry out investigations. In this research, the first problem formulation is, How to Apply Article 44 and Article 45 of the Criminal Procedure Code in the Management of State Seizure and State Seizure. second, how the prosecutor enforces the judge's decision by auctioning off confiscated goods / goods from the state, and what are the obstacles experienced by RUBASAN Class 1 East Jakarta. The research method used in this paper is to use an empirical method with descriptive analysis research characteristics. Where this research directly conducts observations and interviews to obtain the desired data in Rupbasan Klas 1 East Jakarta.

**Keywords:** Implementation of Management of Confiscated Items, Rupbasan East Jakarta, Auctions.